

PEREMPUAN DAN NARASI KEKERASAN: STUDI KRITIS PERAN GENDER DALAM DERADIKALISASI

Abdul Ghofur

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

E-mail: aghofur2009@gmail.com

Sulistiyono Susilo

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

E-mail: sulistiyonosusilo@gmail.com

Abstract: Radicalism is a process initiated from the ideas and teachings that stem from individual stages. Hence, the early detection effort in deradicalization by involving women can run effectively, regarding the fact that women play a vital role in the family, particularly in shaping the character of children. Unfortunately, the role of women in preventing, or actually in promoting and participating, terrorism and political violence seems to be neglected. This qualitative study attempts to examine the role of women in preventing radicalization and at the same time promoting and participating to alleviate terrorism and political violence. The findings of the study reveal that the role of women in the deradicalization can be done in a number of strategies, although not restricted, such as reduction of gender inequality and disparity, giving women a greater role to participate in a multi-field of social realm, strengthening the well-being to prevent radicalization, making women as leaders who hold moderate and tolerant values in education, especially within, though not limited, the family environment, and initiating peace through women's reproductive functions.

Keywords: Women's Role; Religious Extremism; Terrorism; Deradicalization.

Pendahuluan

Radikalisasi kekerasan merupakan proses adopsi sistem kepercayaan yang mempromosikan aksi kekerasan. Jika ditinjau dari arti luas, radikalisasi dapat berbentuk pemahaman yang menekankan

pada perubahan dalam masyarakat.¹ Sebagian cendekiawan sosial cenderung gagal dalam memahami bagaimana seseorang menjadi radikal dan berkomitmen untuk melakukan teror. Penjelasan yang diberikan secara eksklusif hanya mengambil eksplanasi tunggal baik politik, ekonomi, agama dan motivasi, baik oleh pelaku individual, grup, serta pengaruh dan kontribusi jaringan.² Berbagai studi lainnya menerangkan faktor atau kondisi yang kompleks sebagai penyebab radikalisasi termasuk kondisi ekonomi³ deprivasi relatif⁴ kegagalan negara,⁵ kolonialisme Barat,⁶ pendudukan Barat pada masa modern,⁷ dukungan untuk rezim opresif,⁸ masalah identitas, kohesi sosial dan solidaritas,⁹ politik dan integrasi sosial ekonomi,¹⁰ penghinaan,¹¹ serta transfer global mengenai ideologi, teologi, imaji dan narasi kekerasan¹²

¹ Tinka Veldhuis dan Jørgen Staun, *Islamist Radicalisation: a Root Cause Model* (The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009).

² Pete Lentini, "The Transference of Neojihadism: Towards a Process Theory of Transnational Radicalisation", *Radicalisation Crossing Borders: New Directions in Islamist and Jihadist Political, Intellectual, and Theological Thought in Practice/Global Terrorism Research Centre, Refereed 2008* (Proceedings from the GTRC International Conference. Monash University, 2009), 1.

³ Lihat misal Evan Tighe, *Trust in Allah, But Tie Your Camel: The Effects of Radicalized Schooling and State Security on Islamic Terrorism in the Middle East* (Diss: University of Georgia, 2011), 9; Anissa Helie, "The US Occupation and Rising Religious Extremism: The Double Threat to Women in Iraq", *Women's World*, 24 (2005); dan James A. Piazza, "Poverty, Minority Economic Discrimination, and Domestic Terrorism", *Journal of Peace Research* 48.3 (2011), 339.

⁴ Misal baca Thomas Hegghammer, "Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia", *Middle East Policy* 13.4 (2006), 39. Deprivasi relatif (*relative deprivation*) mengacu pada inekualitas struktur sosial dalam arti luas seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, pengangguran, dan buruknya perumahan.

⁵ Tighe, *Trust in Allah, But Tie Your Camel*, 9.

⁶ James Gow, *Militancy and Violence in West Africa*, Funmi Olonisakin dan Ernst Dijkhoorn (eds.) (London: Routledge, 2014).

⁷ Scott Atran, "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism", *Washington Quarterly*, 29.2 (2006), 129.

⁸ Misal lihat Chris Zambelis, "Is there a Nexus between Torture and Radicalization?", *Terrorism Monitor*, 26 (2008).

⁹ Rosalie Smit, "Defining Professionalism in anti-Islamic Radicalism Policies", *Working Research Paper* (Working in the Front-line of Society Amsterdam, 2012).

¹⁰ Riaz Hassan, "Socio-economic Marginalization of Muslims in Contemporary Australia: Implications for Social Inclusion", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30.4 (2010), 575-584.

¹¹ Mina Al-Lami, "Studies of Radicalisation: State of the Field Report", *Politics and International Relations Working Paper* 11.7 (2009).

¹² Lentini, "The Transference of Neojihadism", 1

dan faktor psikologis lainnya.¹³ Akan tetapi, walaupun semua faktor ini dapat berkontribusi pada radikalisasi, tidak ada dari faktor tersebut yang secara independen mampu untuk menjelaskan perubahan drastis pada sikap dan perilaku yang terintegrasi dengan baik pada seorang pelaku radikal.

Selain itu, berbagai kajian sebelumnya juga belum banyak memberi perhatian pada realitas gender, terutama peran perempuan dalam mencegah, ataupun justru mempromosikan dan berpartisipasi dalam terorisme dan kekerasan politik.¹⁴ Lebih detail, walaupun fakta sosial menyatakan bahwa perempuan Indonesia memainkan peran vital dalam lingkup domestik dan publik, dan dipandang lebih efektif dalam deradikalisasi. Akan tetapi secara partikular kajian mengenai hubungan perempuan dalam deradikalisasi belum banyak mendapat perhatian. Padahal penelitian empiris dalam studi gender dan radikalisasi menemukan bahwa gender memainkan peran penting dalam dukungan terhadap radikalisasi sekaligus deradikalisasi.¹⁵ Penelitian lain berusaha mengeksplorasi faktor pendorong (*triggers*) yang berbau dengan motivasi diri untuk menjelaskan mengapa perempuan menjadi pelaku bom bunuh diri. Kekerasan oleh perempuan dianggap sebagai penyimpangan dan perilaku diluar batas kewajaran akibat labelisasi feminin yang mengecilkan peran perempuan dalam radikalisasi. Hal ini berangkat dari asumsi historis bahwa terorisme, sebagai bagian dari budaya perang, militarisme, militansi dan kekerasan, secara primer merupakan dominasi dan domain eksklusif laki-laki.¹⁶ Padahal kajian menunjukkan bahwa deradikalisasi yang hanya berbasis peran maskulinitas, yang menganggap eradikasi terorisme telah dianggap eksklusif bagi laki-laki, terbukti kurang efektif dan cenderung gagal mengatasi kompleksitas radikalisasi.¹⁷ Karena pada kenyataannya, pandangan bias gender telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan menggunakan perempuan sebagai pelaku radikal. Misalnya yang Taliban dan Boko Haram dengan melibatkan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri

¹³ Andrew Silke, "Holy Warriors Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalization", *European Journal of Criminology* 5.1 (2008), 99-123.

¹⁴ Becky Carter, *Women and Violent Extremism* (GSDRC Helpdesk Research Report, 2013).

¹⁵ Charles Hirschkind dan Saba Mahmood, "Feminism, the Taliban, and Politics of Counter-insurgency", *Anthropological Quarterly*, 75.2 (2002), 339-354.

¹⁶ Carter, *Women and Violent Extremism*.

¹⁷ Mia Bloom, "Bombshells: Women and Terror", *Gender Issues* 28.1-2 (2011), 1-21.

untuk aksi teroris ataupun sebagai korban penculikan, pelecehan seksual dan perlakuan buruk lainnya untuk melemahkan kekuatan psikologis pihak lawan/negara. Agenda politik Boko Haram dengan menggunakan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence/GBV*) dengan menarget perempuan melalui penculikan merupakan evolusi signifikan yang digunakan teroris melalui tubuh perempuan. Cara ini merupakan respons atas perlawanan pihak lawan/tentara negara. Dalam kasus demikian, ada hubungan yang signifikan bagaimana faktor gender membentuk ideologi dan kultur kekerasan dan terorisme.¹⁸ Pelibatan perempuan dipandang lebih efektif sehubungan dengan alasan bahwa perempuan dipandang lebih loyal dan lebih aman dari kecurigaan pihak keamanan.¹⁹ Riset juga menemukan bahwa perempuan cenderung untuk mengikuti grup kekerasan ekstrem dengan basis alasan yang sekomples pelaku pria.²⁰

Penelitian ini berupaya mengkaji peran perempuan dalam mencegah radikalisisasi ataupun justru mempromosikan dan berpartisipasi dalam terorisme dan kekerasan politik. Lebih lanjut, tulisan ini berupaya memetakan perkembangan studi dan model fase radikalisisasi yang berhubungan dengan karakter dan akar penyebab radikalisisasi.

Faktor Penyebab Radikalisisasi

Teori NYPD/Kepolisian New York menerangkan empat tahap radikalisisasi yaitu pra radikalisisasi (*pre-radicalisation*), identifikasi diri (*self-identification*), indoktrinasi (*indoctrination*) dan jihadisasi (*jihadization*).²¹ Jika mengacu pada klasifikasi Kühle, fase pertama hingga ketiga tersebut dapat dikategorikan dalam fase ideologi, sedangkan fase terakhir yakni jihadisasi dapat diaktualisasikan dengan gerakan dan rezim politik.²² Kesemua proses tersebut membutuhkan komponen-

¹⁸ J. Zenn dan E. Women Pearson, "Gender and the Evolving Tactics of Boko Haram", *Journal of Terrorism Research*, 5(1) (2014).

¹⁹ Lisa R. Wulan, "Enhancing the Role of Women in Indonesia to Counter Terrorism", *Asia Pacific Center for Security Studies* (2010), 7.

²⁰ Adrien Katherine Wing dan Monica Nigh Smith, "Critical Race Feminism Lifts the Veil: Muslim Women, France, and the Headscarf Ban", *UC Davis L. Rev.* 39 (2005), 743.

²¹ Kris Christmann, *Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism: A Systematic Review of the Research Evidence* (t.t.: Youth Justice Board for England and Wales 2012), 10.

²² Lene Kühle dan Lasse Lindekilde, *Radicalization among Young Muslims in Aarhus* (The Centre for Studies in Islamism and Radicalisation dan Department of Political Science, Aarhus University, 2010).

komponen krusial radikalisis yaitu, komponen motivasional, komponen ideologis, dan proses sosial jaringan dan dinamika grup.²³ Model piramida menekankan pada empat tahap radikalisis sebagai sebuah gerakan progresif negatif yaitu pendekatan universal (*universal approach*) di tingkat terbawah, pendekatan target (*targeted approach*), pendekatan intervensionis (*interventionist approach*), dan pendekatan penguatan (*enforcement approach*). Teori Borum menjelaskan prototip jalur psikologis di mana seorang individu membangun sebuah ideologi yang menjustifikasi terorisme.²⁴

Teori al-Muhajiroun Wiktorowicz mendasarkan pada sosialisasi grup etnik dengan menekankan pada proses empat tahap yaitu kognitif permulaan, pencarian religius, kerangka pendekatan atau persekutuan dan sosialisasi.²⁵ Model Sageman menyediakan tiga faktor kognitif dan satu faktor situasional yaitu reaksi atas pelanggaran moral yang dilakukan pada umat Islam (*sense of 'moral outrage'*), interpretasi spesifik atas dunia (*specific interpretation of the world*) seperti direpresentasikan dalam 'perang melawan Islam', resonansi dengan pengalaman personal (*resonance with personal experiences*) yang berupa interpretasi perang Barat melawan Islam yang diskriminatif dan bias sosial, politik, ekonomi dan religius. Kondisi ini terkombinasikan dengan perasaan diperburuk dengan pengangguran dan kejenuhan atas kondisi buruk yang mendorong pada aktivitas klandestin, serta tahap terakhir adalah mobilisasi jaringan melalui berbagai saluran seperti forum internet, ruang chat, dan interaktivitas. Kemudian delapan tahap rekrutmen dari Taarnby yang meliputi alienasi individual dan marjinalisasi, dorongan spiritual, proses radikalisis, pertemuan dan asosiasi dengan orang dengan keserupaan minat, seklusi gradual dan formasi sel, akseptansi kekerasan sebagai makna politik terlegitimasi, koneksi dengan pemimpin, dan operasionalisasi aksi.²⁶ Model jalur Gill berargumen bahwa proses radikalisis melalui

²³ Arie W. Kruglanski, et.al, "The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism", *Advances in Political Psychology*, Vol. 35, Suppl. 1 (2014), 69.

²⁴ Randy Borum, "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories", *Journal of Strategic Security* 4.4 (2011), 2.

²⁵ Michael King dan Donald M. Taylor, "The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social Psychological Evidence", *Terrorism and Political Violence* 23.4 (2011), 606. Lihat juga Christmann, "Preventing Religious Radicalisation", 12.

²⁶ King dan Taylor, "The Radicalization of Homegrown Jihadists, 606.

empat tahap (sosialisasi dan propaganda, pengalaman pada faktor pendorong, rekrutmen, radikalisasi-internalisasi-polarisasi nilai dan kepercayaan dalam kelompok). Wilner and Dubouloz berargumen bahwa proses radikalisasi dipandu oleh pembelajaran dari pengalaman dan interpretasi untuk menciptakan aksi teroris.²⁷ Studi Bendett menjelaskan proses radikalisasi yang digerakkan oleh kemajuan teknologi.²⁸ Tidak ada penjelasan tunggal tentang radikalisasi. Faktor kepribadian, kebudayaan, atau situasional dapat berefek baik sendiri atau bersama-sama pada radikalisasi atau deradikalisasi.²⁹ Teori lainnya, seperti dari Moghaddam berusaha menjelaskan secara integratif pembentukan terorisme melalui teori tes, model terorisme, dan proses terorisme khususnya terkait dengan Al-Qaeda.³⁰

Dalam model hierarkis, Tinka Veldhuis dan Jørgen Staun mengklasifikasikan faktor makro dan mikro sebagai akar penyebab radikalisasi. Faktor makro merupakan kondisi dasar yang dapat menimbulkan radikalisasi. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan mengapa pada kondisi yang sama seseorang dapat menjadi radikal dan orang lain tidak akan dijelaskan oleh faktor mikro. Pada lingkup makro, faktor penyebabnya adalah lemahnya integrasi, hubungan internasional, dan kemiskinan. Pada lingkup mikro, terbagi dua yaitu yang berhubungan dengan faktor sosial dan faktor individual. Faktor sosial sebagai penyebab radikalisasi adalah kategorisasi diri dan identitas sosial, deprivasi relatif, interaksi sosial dan proses grup. Dalam lingkup individual, faktor mikro yang mempengaruhi adalah karakteristik individu dan pengalaman pribadi.³¹

Dalam penelitian van de Linde dan van der Duin, terdapat setidaknya tiga penyebab yang dapat menjelaskan munculnya radikalisasi. *Pertama*, menjalarnya paham sekularisme atau pemisahan agama dan negara dalam masyarakat Muslim. *Kedua*, pertumbuhan demografi yang memunculkan berbagai perubahan sosial seperti

²⁷ Alex S. Wilner dan Claire-Jehanne Dubouloz, "Homegrown Terrorism and Transformative Learning: an Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization", *Global Change, Peace and Security* 22.1 (2010), 33-51.

²⁸ William N. Nutter, "Radicalization Analysis: Self-Awakening and Social Conduit" (Tesis--American Public University System, 2011).

²⁹ Kruglanski et.al., "The Psychology of Radicalization", 69-93.

³⁰ Christmann, "Preventing Religious Radicalisation", 18.

³¹ Veldhuis dan Staun, *Islamist Radicalisation*, 24.

kemiskinan dan keterbelakangan.³² Korupsi endemik (*endemic corruption*) dan kesalahan tata kelola pemerintahan (*poor governance*) telah berkontribusi pada perkembangan organisasi radikal dengan memangsa kaum muda yang miskin dan pengangguran yang merasa menjadi korban impunitas dan pelanggaran dari budayanya sendiri oleh para pejabat dan politisi. Korupsi yang meluas berhubungan erat dengan tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya menghilangkan kepercayaan legitimasi otoritas politik dan sosial di kalangan rakyat.³³ Ketiga, adalah kondisi ekonomi seperti pengangguran khususnya di kalangan kaum muda dan perbedaan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Keempat adalah kelangkaan infrastruktur dan kebutuhan dasar seperti air dan makanan. Kelima adalah tata kelola pemerintahan seperti kegagalan negara (*failed states*), dan disfungsi pemerintahan dan hilangnya kepercayaan (*lack of trust*). Terakhir adalah realitas kebudayaan berupa tensi sosial dan kultural seperti konfrontasi antara Barat dan Timur. Walaupun poin konsensus ini sepertinya merupakan hubungan antara tren dan radikalisasi, hasil ini tidak dapat menjelaskan kemungkinan munculnya radikalisasi di masa mendatang, kecuali secara umum merupakan pengaruh yang kuat atas radikalisasi yaitu kebencian yang menguat atas Israel, politisasi Islam dan globalisasi jihadisme.³⁴

Di dunia Barat, Perancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat semuanya mempunyai kepercayaan bersama, kebudayaan, nilai dan religi (*common beliefs, values, cultures, dan religions*). Mereka mengintegrasikan populasi minoritas Muslim dalam bentuk yang berbeda secara signifikan. Radikalisasi di Barat muncul karena pengaruh dari sejarah imigrasi (*history of immigration*), kebijakan pemerintah (*government policies*) dan kemampuan untuk berintegrasi dalam masyarakat Barat (*the ability to integrate within western society*).³⁵

Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat dirangkum model menawarkan konsepsi proses dalam tahap perubahan individual,

³² Erik van de Linde dan Patrick van der Duin, "The Delphi Method as Early Warning: Linking Global Societal Trends to Future Radicalization and Terrorism in the Netherlands", *Technological Forecasting and Social Change* 78.9 (2011), 1557-1564.

³³ Lihat Michael O. Sodipo, *Mitigating Radicalism in Northern Nigeria* (National Defense Univ Fort McNair Dc Africa Center for Strategic Studies, 2013).

³⁴ van de Linde dan van der Duin, "The Delphi Method as Early Warning", 1557-1564.

³⁵ Liz Fekete, "Enlightened Fundamentalism? Immigration, Feminism and the Right", *Race and Class* 48.2 (2006), 1-22.

seperti naiknya religiositas dan pencarian identitas yang dikombinasikan dengan aspek eksternal seperti pengalaman diskriminasi, rasisme, atau serangan yang dianggap ditujukan pada umat Islam seperti di Irak, Bosnia, Afghanistan dan Palestina, serta dorongan pada radikalisis kekerasan, utamanya ketika seseorang bersosialisasi dengan orang dengan minat serupa. Walau demikian, berbagai studi dan model tersebut mempunyai kelemahan yaitu semua tahap tersebut tidak sepenuhnya sekuensial/berurutan dan tidak integratif, tetapi dapat saling mendahului, di mana seseorang dapat mencapai radikal tanpa melalui proses sebelumnya atau melewati proses yang lebih tinggi baru proses yang lebih rendah. Model yang dapat dikecualikan dari kelemahan ini adalah model tahap proses radikalisis suksesif dari McCauley and Moskaleiko yang mengonseptualisir 12 tahap radikalisis, yang terbagi dalam tiga level. Menurut teori McCauley and Moskaleiko, terdapat agensi dan struktur dalam radikalisis. Mekanisme level radikalisis terdiri dari level individual (tiga fase), yaitu pengorbanan pribadi (*personal victimisation*), tuntutan politik (*political grievance*), pelibatan diri dalam kelompok radikal (*joining a radical group*). Tahap ini disebut sebagai tahap awal atau permulaan. Adapun level kedua (tiga fase) disebut oleh McCauley and Moskaleiko sebagai mendaki lereng yang licin (*the slippery slope*), yakni terlibat dalam kelompok radikal (*joining a radical group*) tahap kedua, kekuatan cinta (*the power of love*), ekstremitas perubahan pikiran pada kelompok (*extremity shift in like-minded groups*). Level terakhir adalah radikalisis pada tingkat grup (7 fase) yaitu kohesi ekstrem dibawah isolasi dan ancaman (*extreme cohesion under isolation and threat*), kompetisi basis dukungan yang sama (*competition for the same base of support*), kompetisi dengan kekuatan negara (*competition with state power*), kompetisi dalam kelompok-fisi massa (*within group competition- fissioning mass*), politik Jujitsu (*jujitsu politics*), kebencian (*hate*) dan terakhir adalah martir (*martyrdom*). Sebagaimana dijelaskan oleh McCauley and Moskaleiko bahwa mengintegrasikan level eksplanasi dalam proses radikalisis adalah hal yang sulit dan menggunakan sebuah teori saja tidak akan cukup untuk mengintegrasikan perbedaan pengaruh yang dapat membawa seseorang pada radikalisis kekerasan. Dalam konteks ini, model sosio-psikologis cenderung gagal untuk menerangkan secara spesifik dan detail interaksi di antara pelaku dan faktor tersebut.³⁶

³⁶ Christmann, "Preventing Religious Radicalisation", 18.

Ekualitas Gender dan Narasi Kekerasan

Gender dalam arti seksualitas secara historis-politik dipandang sebagai refleksi kesucian dan dimensi transenden dalam kehidupan manusia, terutama pada masyarakat Timur. Di sisi lain, agama adalah sistem diskursif dalam kepercayaan dan praktik yang menawarkan struktur tatanan moral, makna kultural dan tujuan motivasional individual ataupun kolektif melalui eksplorasi simbol transenden dan komunikasi spiritual dengan realitas supernatural yang suprematif.³⁷ Agama penuh dengan konsep utama mengenai hubungan gender, konstruk sosial dan keluarga ideal, sehingga gender memainkan peran yang penting dalam agama. Tantangan utama agama pada masa sekarang adalah perubahan sosial yang diiringi dengan perubahan pandangan secara radikal mengenai relasi dan peran gender. Prinsip ekualitas gender dalam masa modern yang termanifestasikan dalam proposisi bahwa perempuan dan pria diciptakan sama merupakan kebenaran global yang terbukti sendiri (*a global self-evident truth*).

Dalam konteks nasional, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terbuka terhadap adopsi pemikiran dan pembaharuan sistem sosial politik dari luar, termasuk pada organisasi dan otoritas religius. Hal ini didorong oleh tuntutan aplikasi berbagai paradigma dan pranata modern, termasuk hak asasi perempuan, ekualitas gender, asas Islam dan ide feminisme, yang telah turut membentuk debat mengenai posisi sosial perempuan dan penguatan di Indonesia. Islam di Indonesia terus mengalami transformasi pada akhir abad 20 hingga awal abad 21, yang menandai permulaan respons yang sadar oleh Muslim Indonesia pada aliran paham global yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Organisasi Islam utama di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, berjuang untuk mencapai dan menjangkau populasi mayoritas Indonesia dan mempromosikan ide dan nilai religius. Dalam konteks ekualitas gender, kedua organisasi keagamaan terbesar ini secara efektif memasukkan dan merepresentasikan suara perempuan Muslim Indonesia yang bekerja secara aktif dalam promosi dan integrasi hak-hak perempuan dalam semua ruang dalam kehidupan publik.³⁸ Keduanya turut aktif mendedikasikan ambisi mereka dan aspirasi

³⁷ José Casanova dan Anne Phillips, *A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications* (Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2009).

³⁸ Parvanova, "Islamic Feminist Activism in Indonesia", 11-26.

untuk mempromosikan dan mengadvokasi hak-hak perempuan dengan membentuk organ-organ perempuan yang mandiri dalam berbagai level usia seperti Muslimat, Aisyiah, Fatayat, IPPNU, dan lain-lain. Selain itu, pembaruan dan reinterpretasi Islam bersama dengan pengenalan feminisme dan ide demokrasi telah menjadi konsen utama aktivis perempuan Muslim. Pada saat yang sama, gerakan perempuan Indonesia telah ikut mengubah berbagai kebijakan di level lokal, regional dan nasional dengan mendasarkan pada pembangunan basis yang solid pada pengetahuan perempuan, keahlian dan argumentasi untuk meningkatkan pengaruh politik dan pengakuan dalam otoritas sosial.

Aktivis feminis memusatkan pada isu status dan posisi sosial perempuan dan mengadvokasi perempuan dari kondisi opresif dan praktik yang irelevan di berbagai bagian di dunia Muslim. Begitu juga, feminis Indonesia fokus pada strategi untuk mempromosikan sensitivitas gender dan menyebabkan perhatian bias gender sebagaimana pada ide-ide ekualitas gender dan keadilan sosial. Persepsi stereotip memaksakan sebuah peran subordinatif dan status perempuan Indonesia, seperti subjek yang tabu seperti kekerasan domestik dan seksualitas, tetapi juga praktik poligami dan khitan perempuan di antara topik-topik ekualitas gender, termasuk keterlibatan aktif mereka dan proteksi hak-hak perempuan Indonesia, hukum diskriminatif gerakan fundamentalis Islam.³⁹

Dalam konteks radikalisasi dan gender, feminisme Indonesia secara kreatif merespons regulasi restriktif dan praktik diskriminatif yang mensubordinir perempuan. Hal ini rentan membuat perempuan hanya menjadi korban radikalisasi. Berbasis pada pengetahuan profesional dan reinterpretasi mandiri atas sumber-sumber hukum Islam dan pada metodologi yang diderivasikan dari realita sosial dan studi gender, feminisme Indonesia menyediakan perangkat yang komprehensif untuk mempromosikan perempuan dalam ruang publik. Dikombinasikan dengan aktivisme masyarakat sipil, feminisme merepresentasikan sebuah fenomena yang desisif dalam usaha meningkatkan representasi perempuan dalam level publik dan pemerintahan. Poin penting dalam kasus Indonesia adalah bahwa ekualitas gender di Indonesia telah cukup diimplementasikan, dalam hal kesempatan ekonomi, sistem pendidikan, daya tawar dalam keluarga, partisipasi politik, bahkan militer dan penguatan hukum.

³⁹ Ibid.

Banyak organisasi dan komunitas moderat yang memusatkan perhatian pada pemberdayaan perempuan Indonesia.

Secara historis, peranan perempuan hanya mendapat sedikit perhatian dan tidak pernah menjadi *mainstream* dalam pengembangan agama. Pada masa modern ini di mana peran gender berubah, konsepsi dan aplikasi religius membutuhkan peranan perempuan. Dalam konteks radikalisme paham keagamaan, pengakuan terhadap prinsip ekualitas gender harus mendorong institusionalisasi peran perempuan dalam praktik untuk ikut menentukan dimensi kultural, sosiopolitik dan agama yang rawan digunakan oleh ekstremis.⁴⁰ Selain itu, ekualitas gender dalam nilai, status dan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan sangat penting dalam menolak pengaruh radikalisme bagi kaum muda dan perempuan secara umum. Memanfaatkan celah ini dalam deradikalisasi sangat urgen ditinjau dari beberapa aspek.

Pertama, kaum perempuan merupakan pihak yang dijadikan sebagai korban ekstremisme yang tidak menyediakan tempat bagi opini perempuan atau pengakuan akan kehendak bebas mereka. Dalam arti, kepatuhan perempuan potensial digunakan sebagai dasar untuk menekan mereka terlibat dalam radikalisme, baik kekerasan atau non-kekerasan. Di sisi lain, teks-teks keagamaan yang bernuansa patriarkal yang mendomestikasi perempuan, dipahami secara sempit sebagai larangan perempuan untuk berkontribusi pada bidang sosial. Asumsi atas kelemahan fisik, mental dan spiritual perempuan telah menjadikan mereka sebagai subjek kepatuhan pada suami, kekurangan kekuatan dan kontrol diri (*self-control*) dan kultur patriarkal telah merepresentasikan perempuan ideal sebagai istri yang sempurna yang diam dan patuh sepenuh hati terhadap suami tanpa kritik untuk menghasilkan keluarga yang harmonis.

Kedua, perempuan mempunyai peran yang kompleks dalam melibatkan diri dalam mendukung dan mendorong kekerasan religius. Penelitian van de Linde dan van der Duin menyatakan pentingnya peran perempuan bahwa peran perempuan dalam kekerasan ekstremis. Rasionalisasinya adalah perempuan potensial terlibat dalam radikalisme teroris dan pelibatan mereka dalam aksi terorisme cenderung diabaikan. Dalam hal partisipasi perempuan dalam terlibat dan aksi ekstremisme ada peningkatan keterlibatan langsung

⁴⁰ Ronald Inglehart dan Pippa Norris, *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World* (Cambridge University Press, 2003).

perempuan dalam aksi yang secara khusus seperti menjadi pelaku bom bunuh diri (*suicide bombers*).⁴¹ Selain itu, eliminasi marjinalisasi dan stereotip juga berbanding lurus dengan dareadikalisasi, sebagai misal adalah menekankan peran maternal perempuan dalam pembentukan narasi-narasi kontra-terorisme.⁴²

Ketiga, domestikasi dan eksklusivitas perempuan dalam kehidupan publik dan produksi teks keagamaan membuat mereka dapat menjadi aktif menerima bahan pengajaran yang bisa saja dieksploitasi untuk mendukung terorisme. Radikalisasi terhadap perempuan sebagai korban dan pelaku tidak hanya berasal dari praktik radikal, tetapi juga dapat berasal dari teks-teks keagamaan yang subordinatif-diskriminatif perempuan. Prinsip eksklusivitas laki-laki (*male-centric*) dalam produksi dan interpretasi teks-teks keagamaan pada akhirnya dapat membuat perempuan hanya menjadi objek kontrol dari pengetahuan religius serta peran mereka dalam memproduksi narasi yang ekuivalen gender menjadi terabaikan.

Urgensi Pelibatan Perempuan dalam Deradikalisasi

Walaupun pencegahan kekerasan ekstremisme dan intervensi kontraterorisme cenderung untuk mengabaikan perspektif gender dan peran berbasis perempuan, tetapi kapasitas perempuan untuk bereaksi pada ekstremisme bervariasi. Peran perempuan dalam deradikalisasi terkadang diinisiasi oleh pemerintah internasional dan NGO/LSM yang bertujuan untuk mendukung peran perempuan dalam mencegah kekerasan ekstremis, termasuk dengan kerjasama dengan organisasi perempuan akar rumput (*local grassroots women's organisations*). Sehingga pada saat ini, peran perempuan sebagaimana pembentuk kebijakan, edukator, anggota komunitas dan aktivis, dalam kontra kekerasan ekstremisme telah memulai untuk diakui.⁴³

Secara parsial di Indonesia, penelitian Suzanne Brenner mengindikasikan perempuan Indonesia, dengan usaha mereka atas keluarga, anak-anak, usaha/bisnis rumah dan dukungan pada suami, secara aktif merupakan kontribusi atas kesejahteraan ekonomi dan sosial pada keluarga dan masyarakat secara umum.⁴⁴ Peran ini dapat mencegah radikalisasi melalui eliminasi faktor deprivasi relatif

⁴¹ van de Linde dan van der Duin, "The Delphi Method as Early Warning", 1558.

⁴² Ibid.

⁴³ Carter, *Women and Violent Extremism*, 3.

⁴⁴ Suzanne Brenner, "Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and 'the Veil'", *American Ethnologist* 23.4 (1996), 673-697.

(*relative deprivation*) yang mengacu pada inekualitas struktur sosial dalam arti luas seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, pengangguran, dan buruknya perumahan.

Urgensi pelibatan perempuan dalam deradikalisasi melalui pendidikan adalah merupakan fakta bahwa radikalisme dimulai dari ide radikal melalui pendidikan sebagai elemen utama dan dasar pembentuk ide-ide radikalisme. Selain itu, perempuan Indonesia juga secara historis sudah diakui menerima hak dan kebebasan yang sama sebagaimana laki-laki. Sehingga pelibatan perempuan Indonesia dalam semua kebijakan dan perbaikan kondisi publik dan negara dapat dibenarkan secara kultur dan sosial. Karena radikalisme dapat berbentuk non-kekerasan sehingga pendekatan non-kekerasan di mana *mainstream* masyarakat masih mengidentikkan kelembutan dan feminitas lebih dimiliki oleh perempuan, akan lebih sesuai dan efektif dalam deradikalisasi. Alasan penggunaan pendekatan sosial dan psikologis dalam pelibatan perempuan dalam deradikalisasi ditinjau dari aspek gender, khususnya di Indonesia.

Inklusi perempuan dalam ranah publik dan dalam produksi-reinterpretasi teks keagamaan dalam membuat perempuan aktif dalam memerangi ideologi radikal. Dengan rentang peran yang dimainkan perempuan sejak dari lingkup domestik hingga publik, peran perempuan dalam deradikalisasi akan sangat menonjol, termasuk sejak tahap awal berupa antisipasi dan prevensi proses radikalisme. Penguatan perempuan, yang merupakan isu utama dalam perjuangan organisasi-organisasi perempuan Indonesia, terhubung secara intim dengan metode dan strategi aktivis perempuan dalam mendekonstruksi relasi gender dan merevisi hierarki gender dalam masyarakat Indonesia. Penguatan perempuan tergantung pada independensi mereka dalam bidang politik, sosial dan ekonomi dan determinasi mandiri (*self-determination*) sebagaimana partisipasi aktif mereka dalam ranah politik dan publik. Kehidupan marjinal perempuan tidak hanya tergantung pada hierarki gender yang sudah mapan, sikap dan predisposisi diskriminatif yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi sosial politik dan sistem ekonomi, tetapi juga dalam lingkup sekitar mereka sendiri, seperti keluarga dan komunitas lokal.⁴⁵

⁴⁵ Dayana Parvanova, "Islamic Feminist Activism in Indonesia: Muslim Women's Paths to Empowerment", *Austrian Studies in Social Anthropology (Sondernummer 1/2012, Islam und Macht in Südostasien)* (2012), 11-26.

Aktivistis perempuan Muslim Indonesia dan advokasi hak-hak perempuan telah secara efektif termasuk dalam strategi pembacaan kembali al-Qur'ân dan reinterpretasi sumber-sumber utama hukum Islam untuk mempertahankan ide-ide ekualitas gender dan keadilan.⁴⁶ Menguntungkan dari segi jaringan internasional dan pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*), feminis Indonesia telah menyebarkan dan mempromosikan ide oleh figur-figur mapan seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Ziba Mir-Hosseini, Mai Yamani, Shamima Shaikh. Banyak dari mereka juga mengarahkan pandangannya pada interpretasi fundamental dan literal beserta implikasinya dalam Hukum Islam, yang dipersepsikan sebagai produk hegemoni patriarkal. Secara khusus, Indonesia mempunyai banyak stok intelektual Muslim, termasuk dari kalangan perempuan, sebagai sebuah hasil edukasi ekspansif rezim Orde Baru (1966-1998).⁴⁷ Kathryn Robinson menyatakan dalam penelitiannya mengenai politik gender di Indonesia bahwa banyak cendekiawan yang memprotes interpretasi bias gender dari interpretasi sumber-sumber hukum Islam dan berargumen urgennya rekonstruksi nilai-nilai Islam dan eradikasi tradisi patriarkal yang telah mengakar dalam pemikiran dan praktis masyarakat Muslim.⁴⁸

Radikalisasi merupakan sebuah proses yang diinisiasi dari ide dan ajaran yang bermula dari tahap individual. Dalam konteks ini, deteksi dini radikalisme dengan melibatkan perempuan dapat berjalan secara efektif. Hal ini didasari fakta bahwa perempuan memainkan peran vital dalam keluarga, secara partikular dalam pembentukan karakter anak-anak. Perempuan juga menawarkan perspektif yang beragam dalam memecahkan persoalan.⁴⁹ Mereka seringkali mempunyai pendekatan yang lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun dalam kajian gender, perspektif feminitas lebih mengarah pada justifikasi atas budaya patriarki yang mengunggulkan kekuatan fisik lelaki dan rendahnya kapasitas mereka dalam perasaan (maskulinitas negatif) sekaligus pengakuan akan limitasi fisik

⁴⁶ Suzanne Brenner, "Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam, and Gender in Indonesia", *American Anthropologist*, 113.3 (2011), 478-490.

⁴⁷ Parvanova, "Islamic Feminist Activism in Indonesia", 11-26.

⁴⁸ Kathryn May Robinson dan Sharon Bessell (eds.), *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development*, Vol. 8. (Institute of Southeast Asian Studies, 2002), 166.

⁴⁹ Wulan, "Enhancing the Role of Women", 7.

perempuan dan kekuatan perasaan mereka (feminitas positif).⁵⁰ Akan tetapi dalam deradikalisasi yang melawan kekerasan, pandangan feminitas negatif ini dapat dipergunakan, terutama karena perempuan dipandang menawarkan pendekatan yang lebih lembut sebagai komplemen atau bahkan penyempurna aksi yang dilakukan laki-laki. Perempuan mempunyai peran signifikan dalam kontraterorisme, khususnya dalam proyek deradikalisasi.

Peran Perempuan sebagai Perangkat Kontra-radikalisasi

Pelibatan perempuan dalam kontraterorisme, seperti pengalaman di Maroko, Bangladesh, dan Pakistan, berhasil positif. Deradikalisasi kekerasan dan ekstremisme membutuhkan intervensi dalam setiap tahap spektrum radikalisi dari mulai pengukuran penggunaan kekuatan hingga investasi pembangunan proaktif untuk memenuhi tuntutan sosio-ekonomi masyarakat, untuk mengounter ideologi ekstremis dan merehabilitasi individu yang terlibat radikalisi. Operasi kontra radikalisi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal guna mempertahankan kredibilitas pemerintah dan kepercayaan dengan selalu menjalin kerjasama.⁵¹ Komunitas religius perlu dilibatkan dalam kampanye antiterorisme dalam berbagai forum. Begitu pula, pelibatan perempuan sangat penting karena mereka mempunyai kemampuan prevensi dalam tahap deteksi dini radikalisi. Strategi pelibatan perempuan dalam kontraterorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam pendekatan *soft power* yang melibatkan partisipasi berbagai stakeholder dan kerjasama antar agensi seperti pemerintah, pendidikan formal, komunitas dan kelompok religius dalam melawan terorisme.⁵² Indonesia melaksanakan program strategi kontraterorisme militer tradisional, yang dipromosikan secara halus dan *ad hoc*, serta inisiatif untuk tidak melakukan proses deradikalisasi berbasis polisi dalam merespons aktivitas teroris.⁵³ Pendekatan serupa secara global dijalankan oleh Amerika Serikat dalam melawan radikalisi yang dilakukan dengan memusatkan pada

⁵⁰ Paul Amar, "Middle East Masculinity Studies: Discourses of Men in Crisis," Industries of Gender in Revolution", *Journal of Middle East Women's Studies*, 7.3 (2011), 36-70.

⁵¹ Sodipo, *Mitigating Radicalism in Northern Nigeria*, 7.

⁵² Wulan, "Enhancing the Role of Women".

⁵³ Bandingkan strategi Indonesia dengan negara lain seperti Yaman, Irlandia, Kolombia dan Saudi Arabia dalam John Horgan dan Kurt Braddock, "Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of Deradicalization Programs", *Terrorism and Political Violence*, 22.2 (2010), 267-291.

alienasi di antara kelompok marjinal, meningkatkan hubungan sipil-militer dan meningkatkan kesempatan edukasional dan vokasional. Pendidikan formal memainkan peran signifikan dalam kontraterorisme. Strategi nasional yang harus berfokus pada revisi kurikulum yang mengadvokasi ekstremisme dan kekerasan. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan yang dilaksanakan secara intensif, terpadu dan dini serta ekstensifikasi pendidikan religius untuk mencegah radikalisasi dan terorisme, kekerasan dan ekstremisme. Hal ini didasari karena pendidikan, terutama pendidikan religius dan ajarannya, merupakan sumber utama munculnya pemikiran radikal, sehingga menjadikan pendidikan religius moderat sebagai alat kontra terorisme dapat mereduksi pemikiran radikal ke akarnya. Konsekuensinya, sepanjang masyarakat Muslim gagal untuk menciptakan institusi dan ide pendidikan milik negara yang atraktif dan tidak hanya normatif pada warga negaranya, maka akan selalu tersedia ruang pengaruh bagi gerakan radikal untuk menciptakan aliansi global dan melegitimasi klaim sebagai pemimpin umat Islam dengan menggunakan institusi edukasional untuk menstabilkan sistem.⁵⁴

Karen Jacques and Paul J. Taylor mengonfirmasi bahwa keterlibatan perempuan dalam radikalisasi maupun deradikalisasi terkait erat dengan pencapaian pendidikan secara individual.⁵⁵ Karena pendidikan merupakan proses transformasi intelektual dan pengetahuan, termasuk pembentukan karakter anak yang tidak hanya terbatas pada bentuk formal tetapi juga informal dalam lingkup keluarga. Sehingga peran deradikalisasi oleh perempuan menjangkau spektrum yang luas dari proses radikalisasi. Di sisi lain, radikalisasi juga meniscayakan proses transformasi dan transfer paham radikal untuk menjadikan orang biasa menjadi ekstremis dengan memenuhinya dengan pengetahuan ekstremis. Eradikasi ide-ide radikal melalui pengajaran yang moderat dan toleran sangat urgen dilaksanakan. Dalam konteks ini, deteksi dini radikalisasi dengan melibatkan perempuan dapat berjalan secara efektif. Hal ini didasari fakta bahwa perempuan memainkan peran vital dalam keluarga, secara partikular dalam pembentukan karakter anak-anak.

Kelompok teroris masih muncul dan merekrut kader baru, yang sebagian besar adalah kaum muda. Mereka seringkali merupakan

⁵⁴ Kovacs, "Saudi Arabia Exporting Salafi Education", 1.

⁵⁵ Karen Jacques dan Paul J. Taylor, "Myths and Realities of Female-perpetrated Terrorism", *Law and Human Behavior*, 37.1 (2013), 35.

perempuan yang vokal mendukung kelompok teroris. Dalam konteks ini, kebijakan imperatif untuk membentuk ulama dan mengubah pola pikir perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kontraterorisme. Perempuan merupakan guru alami bagi keluarga dan anak-anak, maka mereka harus memainkan peran vital dalam mempengaruhi kebijakan keluarga. Karena pendidikan merupakan proses transformasi intelektual dan pengetahuan, termasuk pembentukan karakter anak yang tidak hanya terbatas pada bentuk formal tetapi juga informal dalam lingkup keluarga. Pelibatan perempuan sangat penting karena mereka mempunyai kemampuan prevensi dalam tahap deteksi dini radikalisis, sehingga peran deradikalisis oleh perempuan menjangkau spektrum yang luas dari proses radikalisis. Untuk menciptakan perspektif moderat, perempuan harus berada dalam pendidikan moderat dalam lingkungan yang moderat.

Perempuan Indonesia dapat ikut terlibat dalam menciptakan sebuah strategi nasional dengan mengonsolidasikan ide-ide dan usaha dari organisasi dan gerakan wanita dalam produksi ide dan aksi kontraterorisme. Kedua perempuan Indonesia dapat terlibat dalam program kontraterorisme berbasis komunitas seperti dalam berbagai forum dan perkumpulan perempuan Indonesia dari tingkat desa hingga kota besar. Mereka merupakan senjata ampuh sebagai agen kontraterorisme dengan menciptakan strategi berbasis komunitas. Ketiga, wanita Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan dan deteksi dini dengan program berbasis komunitas melalui perhatian mereka terhadap media dan sarana kampanye lainnya.⁵⁶

Pertama, reduksi ketidaksetaraan gender dan memberikan perempuan peran yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam multi bidang sosial. Reduksi dukungan terhadap radikalisis merupakan usaha puncak melawan ancaman terorisme dan induknya, yaitu ideologi ekstremisme. Penguatan pesan non-kekerasan dan langkah penting untuk membangun pertahanan komunitas yang kuat. Implementasi lebih lanjut, kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan eliminasi diskriminasi gender dapat menciptakan sebuah lingkungan

⁵⁶ Wulan, "Enhancing the Role of Women", 11.

yang mendorong pada reduksi dukungan terhadap ideologi ekstremis.⁵⁷

Kedua, penguatan kesejahteraan multi sektoral (*well-being*) guna mencegah terjadinya radikalisasi. Kesejahteraan dalam lingkup keluarga banyak dibebankan kepada peran perempuan. Pelibatan perempuan dapat dilaksanakan dalam multi sektor kehidupan seperti penguatan ekonomi, pendidikan keluarga, agama, penguatan hukum, dan informasi berbasis komunitas serta deteksi dini. Karena akar terorisme adalah alienasi personal dan *inferiority complex* seperti kemiskinan, maka pembangunan ekonomi merupakan keniscayaan. Terdapat hubungan positif antara kesuksesan deradikalisasi melalui pembangunan ekonomi yang didasari oleh pendidikan dan ekuualitas gender.

Dalam konteks ini, penguatan ekonomi perempuan sangat penting ditinjau dari eliminasi deprivasi relatif sebagai faktor pendorong radikalisasi tak langsung yang mendasar, penting, dan berdimensi ekonomi. Sebagai misal, Bangladesh melaksanakan program deradikalisasi melalui inisiatif penguatan ekonomi perempuan. Inisiatif semacam ini menyediakan sebuah kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan dalam ranah domestik. Mereka dapat menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan daya tawar pada suami dan pendidikan anak-anak.

Ketiga, menjadikan perempuan sebagai lokomotif terdepan dalam pendidikan moderat, terutama dimulai, walaupun tidak terbatas, dari lingkungan keluarga. Maroko melaksanakan kontraterorisme berbasis pendidikan moderat untuk melawan penyebaran radikalisasi. Untuk menciptakan kelompok religius moderat, pemerintah melatih dan mendidik perempuan untuk memfasilitasi pendidikan yang lebih moderat dalam pemahaman agama. Perempuan yang telah terlatih ini dipekerjakan dalam komunitas, masjid dan pengajaran agama di Kota Rabat dan Casablanca.⁵⁸ Di Pakistan, salah satu negara paling rawan di dunia, dalam hal ancaman radikalisasi, beberapa organisasi perempuan aktif mempromosikan agenda untuk memperjuangkan otonomi

⁵⁷ Gunaratna, Rohan, dan Karunya Jayasena, "Global Support for al Qaeda and Osama bin Laden: an Increase or Decrease?", *UNISCI Discussion Papers* 25 (2011), 10-16.

⁵⁸ Wulan, "Enhancing the Role of Women", 10.

perempuan. Agenda politik dilaksanakan dengan memahami posisi subjek perempuan sebagai aktivis politik religius yang dijalankan dengan mendekonstruksi teks-teks keagamaan klasik yang bias gender. Hal ini karena teks-teks keagamaan menjadi inspirasi utama radikalisis yang rawan menggunakan perempuan sebagai korban, ataupun justru pelaku.⁵⁹

Cara ini juga dilakukan oleh beberapa organisasi feminis di Indonesia, yang berbasis religius semacam Fahmina Institute, Rahima, Puan Amal Hayati, dan Kalyanamitra dengan memperjuangkan kesetaraan gender melalui berbagai program, salah satunya adalah kaderisasi ulama perempuan. Selain berbagai organisasi sipil, Komisi Nasional Perempuan sebagai agensi negara juga aktif memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendidikan moderat dan mengadvokasi eliminasi hukum dan peraturan yang diskriminatif gender. Banyak individu, baik laki-laki maupun perempuan juga aktif menyuarakan kesetaraan gender sebagai salah satu upaya mencegah radikalisis paham keagamaan maupun aksi teror. Mereka menginterpretasikan sumber-sumber otoritatif dalam Islam berupa al-Qur'an dan Sunnah, guna menyuarakan bahwa kesetaraan gender adalah sesuai dengan nilai-nilai keadilan fundamental dan kesetaraan substansial dalam Islam.

Keempat, menginiasiasi perdamaian lewat peran reproduksi perempuan. Misalnya adalah di Liberia di mana perempuan juga mempunyai peran yang sangat bernilai dalam proses perdamaian. Sebagai misal adalah usaha dari Gerakan Perdamaian Liberia (*The Liberian Peace Movement*) yang dipimpin oleh Leymah Gbowee yang memimpin aksi memobilisir ribuan perempuan untuk memprotes perang sipil Liberia dengan menjalankan aksi diam dan menolak hubungan seks dengan suami. Gerakan ini telah berkontribusi dalam mengakhiri perang sipil pada tahun 2003. Sedangkan di Nigeria, sebagian besar pelaku radikal di Nigeria merupakan pengikut atau simpatisan yang dimotivasi secara primer oleh kerasnya kompetisi ekonomi. Banyak dari pelaku teroris tidak mendapatkan pendidikan formal dan kesempatan kerja. Dalam kasus yang demikian, eliminasi radikalisis harus bermula dari eradikasi kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat sipil harus mengonsentrasikan pendorong radikalisis ini. Komitmen untuk

⁵⁹ A. Jamal, *Feminist Selves and Feminism's Others: Feminist Representations of Jamaat-e-Islami Women in Pakistan*, *Feminist Review* (2005), 52-73.

mereduksi secara drastis kemiskinan dan keterbelakangan dapat ditunjukkan dengan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan umum. Penguatan warga negara untuk memperoleh pendidikan dan keahlian vokasional membutuhkan anggota aktif dan fungsional.⁶⁰

Catatan Akhir

Di antara berbagai model penyebab radikalisasi, faktor yang berhubungan dengan kemiskinan, deprivasi relatif, karakteristik individual dan pengalaman pribadi mempunyai hubungan yang peran perempuan. Walau tidak menafikan peran perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, tetapi tetap tidak bisa diabaikan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam lingkup keluarga. Radikalisasi merupakan sebuah proses yang diinisiasi dari ide dan ajaran yang bermula dari tahap individual. Dalam konteks ini, deteksi dini radikalisasi dengan melibatkan perempuan dapat berjalan secara efektif. Hal ini didasari fakta bahwa perempuan memainkan peran vital dalam keluarga, secara partikular dalam pembentukan karakter anak-anak. Lebih lanjut, banyak dari pelaku teroris tidak mendapatkan pendidikan formal dan kesempatan kerja. Dalam kasus yang demikian, eliminasi radikalisasi harus bermula dari eradikasi kemiskinan dan pengangguran. Komitmen untuk mereduksi radikalisasi dapat dilakukan dengan menurunkan kemiskinan dan keterbelakangan melalui peningkatan partisipasi pendidikan moderat dan peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam konteks peran gender, adanya persepsi limitasi mental dan fisik perempuan rawan menjadikan mereka sebagai korban ekstremisme, dan dapat terlibat langsung dalam aksi yang secara khusus seperti menjadi pelaku bom bunuh diri (*suicide bombers*), dengan justifikasi teks-teks keagamaan yang misoginis. Teks-teks demikian cenderung mendomestikasi dan mengeksklusifkan peran perempuan hanya dalam kehidupan privat sehingga membuat mereka dapat menjadi aktif menerima bahan pengajaran yang bisa saja dieksploitasi untuk mendukung terorisme. Kepatuhan *non-reserve* perempuan potensial digunakan sebagai dasar untuk menekan mereka terlibat dalam radikalisasi, baik kekerasan atau non-kekerasan.

Karena itu, peran perempuan dalam deradikalisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, walaupun tidak terbatas, di antaranya adalah reduksi inekualitas gender dan memberikan perempuan peran yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam multi bidang sosial, penguatan

⁶⁰ Sodipo, *Mitigating Radicalism in Northern Nigeria*, 7.

kesejahteraan multi sektoral (*well-being*) guna mencegah terjadinya radikalisasi dan menjadikan perempuan sebagai lokomotif terdepan dalam pendidikan moderat, terutama dimulai, walaupun tidak terbatas, dari lingkungan keluarga, serta menginisiasi perdamaian lewat peran reproduksi perempuan.

Dalam kasus Indonesia, deradikalisasi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik kultur dan kondisi sosio-politik lokal. Radikalisasi di Indonesia merupakan fenomena yang aneh, walaupun tetap dimungkinkan, karena sedikitnya kondisi deprivatif yang dapat memunculkan radikalisasi. Kebijakan imperatif untuk membentuk ulama dan mengubah pola pikir perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kontraterorisme. Pelibatan perempuan dalam deradikalisasi berhubungan erat dengan posisi perempuan merupakan guru alami bagi keluarga dan anak-anak, yang harus memainkan peran vital dalam mempengaruhi kebijakan keluarga. Karena pendidikan merupakan proses transformasi intelektual dan pengetahuan, termasuk pembentukan karakter anak yang tidak hanya terbatas pada bentuk formal tetapi juga informal dalam lingkup keluarga. Pelibatan perempuan sangat penting karena mereka mempunyai kemampuan preventif dalam tahap deteksi dini radikalisasi. Sehingga pengambil kebijakan harus terus memanfaatkan peran vital dan ekstensif yang dapat dimainkan perempuan yang mampu menjangkau spektrum yang luas dari proses radikalisasi.

Daftar Rujukan

- Al-Lami, Mina. "Studies of Radicalisation: State of the Field Report", *Politics and International Relations Working Paper* 11.7, 2009.
- Amar, Paul. "Middle East Masculinity Studies: Discourses of Men in Crisis," *Industries of Gender in Revolution*", *Journal of Middle East Women's Studies*, 7.3, 2011.
- Atran, Scott. "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism", *Washington Quarterly*, 29.2, 2006.
- Bloom, Mia. "Bombshells: Women and Terror", *Gender Issues* 28.1-2, 2011.
- Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories", *Journal of Strategic Security* 4.4, 2011.
- Brenner, Suzanne. "Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam, and Gender in Indonesia", *American Anthropologist*, 113.3, 2011.

- Brenner, Suzanne. "Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and "the Veil", *American Ethnologist* 23.4, 1996.
- Carter, Becky. *Women and Violent Extremism*. GSDRC Helpdesk Research Report, 2013.
- Casanova, José dan Phillips, Anne. *A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2009.
- Christmann, Kris. *Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism: A Systematic Review of the Research Evidence*. t.t.: Youth Justice Board for England and Wales 2012.
- Fekete, Liz. "Enlightened Fundamentalism? Immigration, Feminism and the Right", *Race and Class* 48.2, 2006.
- Gow, James. *Militancy and Violence in West Africa*, Funmi Olofinisakin dan Ernst Dijkhoorn (eds.). London: Routledge, 2014.
- Gunaratna, Rohan, dan Jayasena, Karunya. "Global Support for al Qaeda and Osama bin Laden: an Increase or Decrease?", *UNISCI Discussion Papers* 25, 2011.
- Hassan, Riaz. "Socio-economic Marginalization of Muslims in Contemporary Australia: Implications for Social Inclusion", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30.4, 2010.
- Hegghammer, Thomas. "Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia", *Middle East Policy* 13.4, 2006.
- Helie, Anissa. "The US Occupation and Rising Religious Extremism: The Double Threat to Women in Iraq", *Women's World*, 24, 2005.
- Hirschkind, Charles dan Mahmood, Saba. "Feminism, the Taliban, and Politics of Counter-insurgency", *Anthropological Quarterly*, 75.2, 2002.
- Horgan, John dan Braddock, Kurt. "Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs", *Terrorism and Political Violence*, 22.2, 2010.
- Inglehart, Ronald dan Norris, Pippa. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World*. Cambridge University Press, 2003.
- Jacques, Karen dan Taylor, Paul J. "Myths and Realities of Female-perpetrated Terrorism", *Law and Human Behavior*, 37.1, 2013.
- Jamal, A. Feminist Selves and Feminism's Others: Feminist Representations of Jamaat-e-Islami Women in Pakistan, *Feminist Review*, 2005.

- King, Michael dan Taylor, Donald M. "The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social Psychological Evidence", *Terrorism and Political Violence* 23.4, 2011.
- Arie W. Kruglanski, et.al, "The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism", *Advances in Political Psychology*, Vol. 35, Suppl. 1, 2014.
- Kühle, Lene dan Lindekilde, Lasse. *Radicalization among Young Muslims in Aarhus*. The Centre for Studies in Islamism and Radicalisation dan Department of Political Science, Aarhus University, 2010.
- Lentini, Pete. "The Transference of Neojihadism: Towards a Process Theory of Transnational Radicalisation", *Radicalisation Crossing Borders: New Directions in Islamist and Jihadist Political, Intellectual, and Theological Thought in Practice/ Global Terrorism Research Centre, Refereed* 2008. Proceedings from the GTReC International Conference. Monash University, 2009.
- Linde, Erik van de dan Duin, Patrick van der. "The Delphi Method as Early Warning: Linking Global Societal Trends to Future Radicalization and Terrorism in the Netherlands", *Technological Forecasting and Social Change* 78.9, 2011.
- Nutter, William N. "Radicalization Analysis: Self-Awakening and Social Conduit". Tesis--American Public University System, 2011.
- Parvanova, Dayana. "Islamic Feminist Activism in Indonesia: Muslim Women's Paths to Empowerment", *Austrian Studies in Social Anthropology. Sondernummer 1/2012, Islam und Macht in Südostasien*, 2012.
- Piazza, James A. "Poverty, Minority Economic Discrimination, and Domestic Terrorism", *Journal of Peace Research*, 48.3, 2011.
- Robinson, Kathryn May dan Bessell, Sharon (eds.). *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development*, Vol. 8. Institute of Southeast Asian Studies, 2002.
- Silke, Andrew. "Holy Warriors Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalization", *European Journal of Criminology*, 5.1, 2008.
- Smit, Rosalie. "Defining Professionalism in anti-Islamic Radicalism Policies", *Working Research Paper. Working in the Front-line of Society Amsterdam*, 2012.
- Sodipo, Michael O. *Mitigating Radicalism in Northern Nigeria*. National Defense Univ Fort McNair Dc Africa Center For Strategic Studies, 2013.

- Tighe, Evan. *Trust in Allah, But Tie Your Camel: The Effects of Radicalized Schooling and State Security on Islamic Terrorism in the Middle East*. Diss: University of Georgia, 2011.
- Veldhuis, Tinka dan Staun, Jørgen. *Islamist Radicalisation: a Root Cause Model*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009
- Wilner, Alex S. dan Dubouloz, Claire-Jehanne. "Homegrown Terrorism and Transformative Learning: an Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization", *Global Change, Peace and Security* 22.1, 2010.
- Wing, Adrien Katherine dan Smith, Monica Nigh. "Critical Race Feminism Lifts the Veil: Muslim Women, France, and the Headscarf Ban", *UC Davis L. Rev.*39, 2005.
- Wulan, Lisa R. "Enhancing the Role of Women in Indonesia to Counter Terrorism", *Asia Pacific Center for Security Studies*, 2010.
- Zambelis, Chris. "Is there a Nexus between Torture and Radicalization?", *Terrorism Monitor*, 26, 2008.
- Zenn, J. dan Pearson, E. Women. "Gender and the Evolving Tactics of Boko Haram", *Journal of Terrorism Research*, 5(1), 2014.